RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Yeni Lestari Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso No. KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru
yenipakpahan03@gmail.com

Abstrak:

ruang lingkup dan ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dari negara-negara yang berbeda. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek dalam konteks hubungan internasional, sedangkan ketentuan ini mengatur implementasi hukum perdata internasional di tingkat nasional. Namun, tantangan dan perbedaan pendekatan di antara negara-negara dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan menerapkan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, kerangka kerja hukum yang jelas dan kerjasama internasional yang efektif diperlukan untuk memastikan pengaturan yang tepat dan harmonis dalam ruang lingkup dan ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional.

Keywords: Ruang Lingkup, Ketentuan Hukum, Perdata Internasional

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antara negara-negara di dunia semakin erat. Hal ini membawa implikasi yang signifikan dalam bidang hukum, terutama dalam konteks hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan lembaga hukum dari negara-negara yang berbeda. Dalam sistem hukum nasional, terdapat ruang lingkup dan ketentuan yang mengatur aspek-aspek hukum perdata internasional. Latar belakang masalah ini akan membahas ruang lingkup dan ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional mencakup berbagai aspek yang melibatkan subjek hukum dari negara-negara berbeda. Hal ini dapat mencakup perjanjian komersial antara perusahaan multinasional, perjanjian perkawinan antara warga negara asing, atau penyelesaian sengketa perdata antara individu dari negara yang berbeda. Ruang lingkup ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya interaksi internasional dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, dan mobilitas individu.

ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional merujuk pada aturan-aturan yang mengatur implementasi hukum perdata internasional di tingkat nasional. Negara-negara memiliki peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata internasional diterapkan dan dilaksanakan di wilayah mereka. Misalnya, negara dapat memiliki undang-undang yang mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG) sebagai bagian dari hukum nasional mereka, yang mengatur perjanjian penjualan internasional. Ketentuan ini mungkin mencakup persyaratan formal dalam mengadopsi aturan-aturan hukum perdata internasional, prosedur pengadilan, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional

Namun, ruang lingkup dan ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional tidak selalu mudah diimplementasikan. Terdapat tantangan dan perbedaan pendekatan di antara negara-negara dalam mengadopsi dan menerapkan aturan-aturan hukum perdata internasional. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk perbedaan dalam sistem hukum nasional, bahasa, budaya, dan perbedaan konsepsi hukum yang mendasari negara-negara tersebut. Selain itu, pertentangan antara kedaulatan negara dan perlindungan kepentingan nasional juga dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan menerapkan hukum perdata internasional.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting bagi negara-negara untuk memiliki kerangka kerja hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur ruang lingkup dan ketentuan hukum perdata internasional. Kerjasama internasional juga penting dalam mengembangkan instrumen hukum yang lebih efektif dan harmonis dalam mengatasi masalah yang timbul dalam konteks hukum perdata internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan regional telah berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama dan harmonisasi hukum perdata internasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ruang Lingkup Dalam Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Perdata Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional?

Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Ruang Lingkup Dalam Hukum Perdata Internasional
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Dalam mengenai ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI), Sudargo Gautama menyajikan berbagai pendapat atau pandangan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat pertama, HPI sama dengan *Rechtstoepassingrecht*. Dalam pandangan ini, HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*rechtstoepassing*). Diskusi hanya berfokus pada masalah yang berkaitan dengan hukum yang harus diterapkan, sedangkan hal-hal seperti kompetensi pengadilan, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalitas) tidak termasuk dalam ruang lingkup HPI.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa HPI sama dengan *Choice of Law* dan *Choice of Jurisdiction*. Menurut konsep ini, HPI tidak hanya melibatkan persoalan *conflict of law* (*Choice of Law*), tetapi juga *conflict of jurisdiction* (*Choice of Jurisdiction*). Dalam hal ini, HPI mencakup masalah hukum yang harus diberlakukan serta kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili kasus tersebut. Pendekatan semacam ini umumnya dianut oleh negara-negara berbasis *common law* seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara lain.
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa HPI sama dengan *Choice of Law* ditambah *Choice of Jurisdiction* dan *Condition des Etrangers*. Dalam pandangan ini, HPI tidak hanya melibatkan pemilihan hukum (*Choice of Law*) dan yurisdiksi (*Choice of Jurisdiction*), tetapi juga mempertimbangkan status orang asing (*Condition des Etrangers*). Pendekatan semacam ini umumnya dianut oleh negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.
4. Pendapat terakhir menyatakan bahwa HPI sama dengan *Choice of Law* ditambah *Choice of Jurisdiction*, *Condition des Etrangers*, dan *Nationalite*. Menurut konsep ini, HPI melibatkan pemilihan hukum (*Choice of Law*), yurisdiksi (*Choice of Jurisdiction*), status orang asing (*Condition des Etrangers*), dan kewarganegaraan (*Nationalite*). Masalah kewarganegaraan ini mencakup isu tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pendekatan HPI yang paling luas ini umumnya dianut oleh HPI Perancis.¹

¹ Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Hlm 9-15, diakses pada tanggal 28 maret 2024

Ketentuan Hukum Perdata Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional

Terdapat tiga ketentuan pokok dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), yaitu:

1. Pasal 16 AB (*Lex Patriae*): Status wewenang seseorang harus dinilai berdasarkan hukum nasionalnya. Artinya, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tetap terikat pada hukum nasionalnya, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal yang sama berlaku analogi untuk orang asing, di mana status dan wewenang mereka harus dinilai berdasarkan hukum negara asalnya.
2. Pasal 17 AB (*Lex Resitae*): Mengenai benda tetap (misalnya properti) harus dinilai berdasarkan hukum negara atau tempat di mana benda tersebut berlokasi. Dalam hal ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara atau tempat di mana benda tersebut berada.
3. Pasal 18 AB (*Locus Regit Actum*): Bentuk tindakan hukum dinilai berdasarkan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan. Artinya, aturan yang mengatur tindakan hukum (misalnya kontrak) adalah hukum dari negara di mana tindakan tersebut dilakukan.

Ketiga pasal ini merupakan contoh ketentuan penunjuk dalam HPI, yang menunjukkan sistem hukum tertentu yang akan diterapkan, baik itu hukum nasional maupun hukum asing. Prinsip HPI selalu mempertanyakan hukum negara mana yang berlaku dan diterapkan dalam penyelesaian perkara internasional. Penerapan hukum asing dilakukan apabila dianggap lebih relevan atau adil daripada menerapkan hukum nasional. Namun, terkadang penerapan hukum asing untuk masalah tertentu dianggap tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dibuat peraturan khusus yang menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengacu pada sistem hukum tertentu, yang disebut sebagai ketentuan mandiri.

Sebagai contoh, jika seorang WNI berada di luar negeri dan membuat surat wasiat, hukum yang akan diterapkan tergantung pada aspek yang menjadi pertimbangan. Jika berkaitan dengan status dan wewenang, seperti syarat usia dan keberimbangan pikiran, maka akan diterapkan Pasal 16 AB yang mengacu pada hukum Indonesia. Namun, jika melibatkan tindakan hukum, seperti cara pembuatan surat wasiat, akan diterapkan hukum asing sesuai dengan Pasal 18 AB.

Dalam hal ini, muncul pertanyaan apabila hukum asing tersebut mengatur cara pembuatan surat wasiat yang lebih mudah, misalnya dengan menulis di selembur kertas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata Indonesia yang menginginkan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan waris yang akan menerima harta dari surat wasiat tersebut.²

² *Ibid*

Untuk mencegah hal-hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Indonesia, terdapat ketentuan mandiri yang diatur dalam Pasal 945 ayat (1) BW. Pasal ini menyatakan bahwa seorang WNI yang berada di luar negeri tidak diizinkan membuat surat wasiat kecuali melalui akta otentik dan dengan memperhatikan tata cara yang umum berlaku di negara tempat surat wasiat dibuat. Dengan demikian, apapun isi ketentuan asing yang berlaku, surat wasiat harus dibuat dalam bentuk otentik, dan hanya formalitas yang sesuai dengan ketentuan di negara yang bersangkutan yang harus dipenuhi.

Ketentuan mandiri memiliki sifat-sifat berikut:

1. Menentukan hukum yang harus diterapkan sendiri.
2. Tidak mengindahkan ketentuan asing yang mungkin ada mengenai materi yang diatur, bisa sama atau berbeda.
3. Tidak identik dengan ketentuan intern.

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), terdapat dua jenis ketentuan, yaitu ketentuan penunjuk dan ketentuan mandiri. Pasal 945 ayat (1) BW sebenarnya mencakup kedua jenis ketentuan tersebut sekaligus, yakni melalui persyaratan otentik (ketentuan mandiri) dan formalitas sesuai hukum tempat pembuatan surat wasiat (ketentuan penunjuk).

HPI diterapkan ketika suatu perkara melibatkan unsur asing, dan dalam beberapa kasus, hukum asing diterapkan. Pertanyaannya adalah mengapa kita menerapkan hukum asing dan mengapa tidak menggunakan hukum perdata kita sendiri? Bukankah kita lebih familiar dengan hukum nasional kita daripada hukum asing? Jika kita menerapkan hukum nasional, bukankah ini akan menghindari masalah HPI?

Beberapa ahli berpendapat bahwa menyelesaikan perkara hanya dengan menerapkan hukum nasional (*lex fori*) saja akan dianggap tidak adil. Dasar penerapan hukum asing adalah rasa keadilan yang ada dalam kesadaran hukum kita sendiri. Pada kenyataannya, tidak ada negara yang secara mutlak hanya menerapkan *lex fori*. Setiap sistem hukum memiliki ketentuan yang mengatur penerapan hukum asing.³

Kesimpulan

³ *ibid*

mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional mencakup berbagai aspek yang melibatkan subjek hukum dari negara-negara berbeda. Hal ini dapat mencakup perjanjian komersial antara perusahaan multinasional, perjanjian perkawinan antara warga negara asing, atau penyelesaian sengketa perdata antara individu dari negara yang berbeda. Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), terdapat dua jenis ketentuan, yaitu ketentuan penunjuk dan ketentuan mandiri. Pasal 945 ayat (1) BW sebenarnya mencakup kedua jenis ketentuan tersebut sekaligus, yakni melalui persyaratan otentik (ketentuan mandiri) dan formalitas sesuai hukum tempat pembuatan surat wasiat (ketentuan penunjuk).

DAFTAR PUSTAKA

Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Hlm 9-15.